



**Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

**Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Tahun Anggaran 2019

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta penjelasan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Pangkalpinang, Februari 2019

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



H. FERY INSANI
NIP. 19700620 199903 1 009

IHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan.

LAKIN Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LAKIN dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LAKIN ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam RENSTRA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 4 sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, menunjukkan bahwa capaian pada 4 sasaran strategis masuk pada kategori sangat tinggi. Semua sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 pencapaiannya di atas 80%. Realisasi capaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018							
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	%	100	100	100	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	%	80	100	125	Sangat Baik

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018							
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	%	80	81,81	102,26	Sangat Baik
4.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	%	75	85	113,33	Sangat Baik

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, SDM perencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum bias dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dan belum optimalnya pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya untuk melakukan integrasi perencanaan dan penganggaran agar dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 2017–2022. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2018 merupakan tahun awal penjabaran Renstra Bappeda periode 2017–2022.

Pada tahun 2018, Bappeda melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah guna menghasilkan rancangan kebijakan dalam tugas-tugas perencanaan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat daerah maupun lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, Bappeda menyampaikan laporan kinerja yang memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Pertanggungjawaban kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan

utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 memiliki dua fungsi utama. *Pertama* merupakan sarana bagi Bappeda untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur. *Kedua*, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bappeda sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja setiap Instansi Pemerintah.

I.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

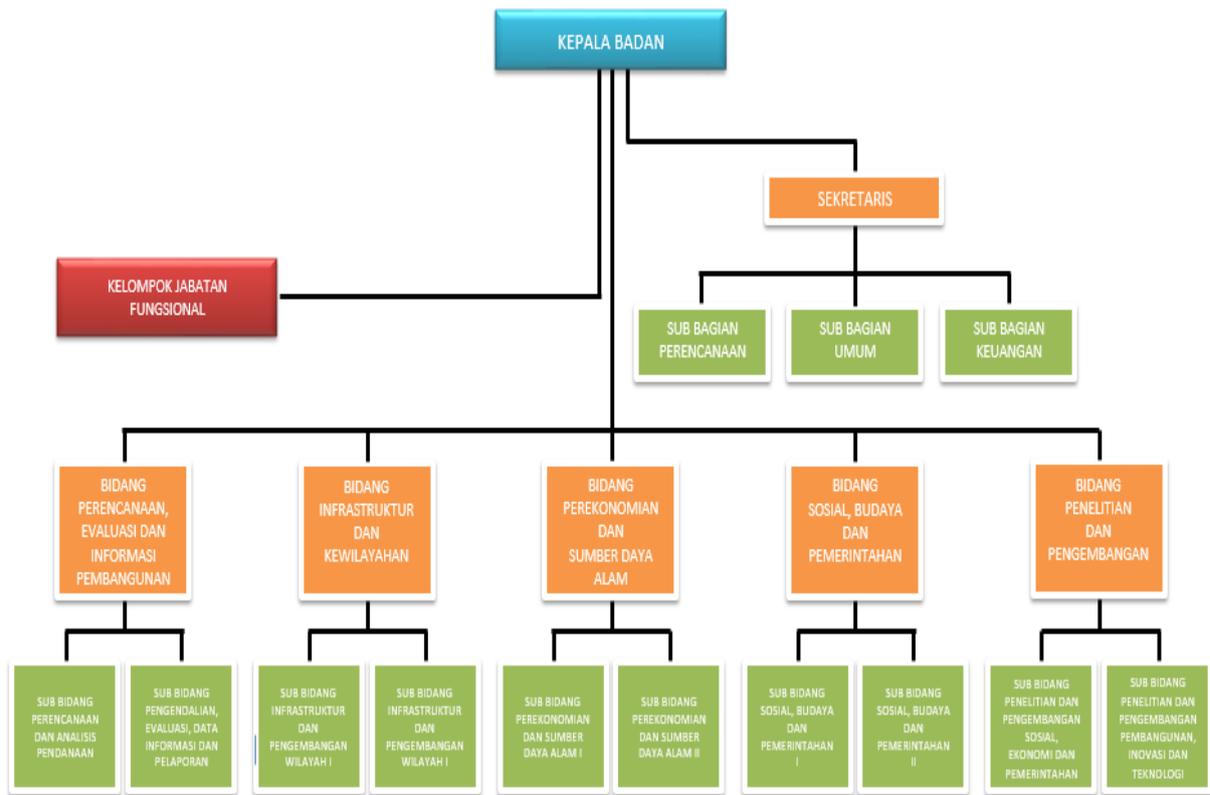
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

I.3 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Secara garis besar Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini :

BAGAN 1.

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

I.4 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.5 Sumber Daya Manusia

Pegawai Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebanyak 71 orang. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 1, terdiri dari 4 orang atau 5,3 % berpendidikan doktor/S3; 20 orang atau 28,16 % berpendidikan master/S2; 37 orang atau 52,11 % berpendidikan sarjana/S1; 3 orang atau 4 % Sarjana muda/D3; 7 orang atau 9,3 % berpendidikan SLTA. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Komposisi Pegawai Bappeda Tahun 2018 Berdasarkan Pendidikan

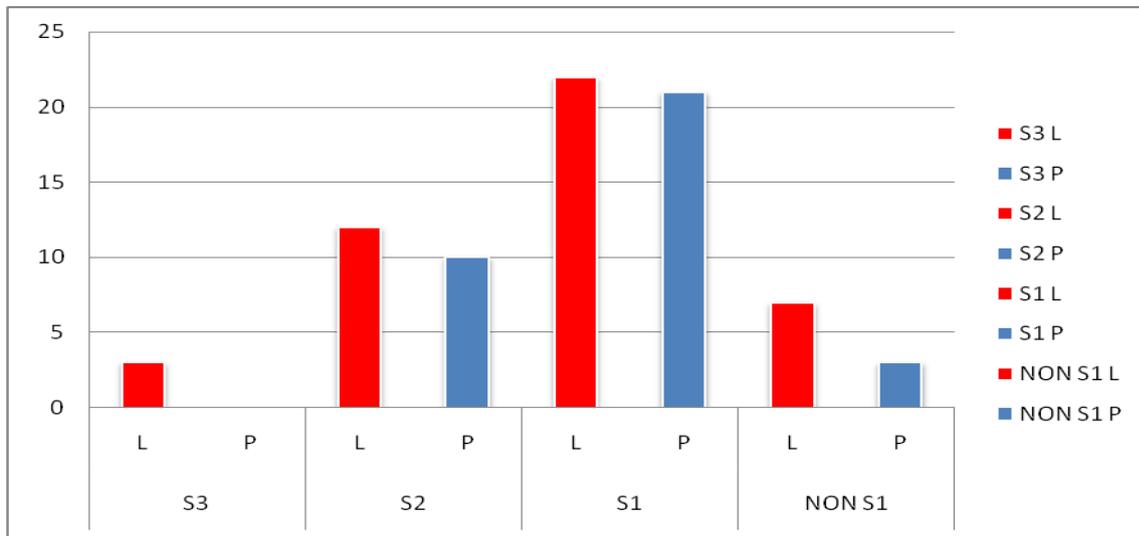
KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH	
		S3		S2		S1		NON S1			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
JPT	PRATAMA (Eselon II)			1						1	
ADMINISTRASI	ADMINISTRATOR (Eselon III)	3		2	1					6	
	PENGAWAS (Eselon IV)	1		2	5	3	2			13	
	PELAKSANA										
	1	Analisis Lingkungan Hidup					1				1
	2	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			2	2	4	3		1	12
	3	Analisis Program Pembangunan									
	4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur					1				1
	5	Analisis Tata Ruang					1				1
	6	Analisis Tata Usaha			1						1
7	Bendahara						1			1	



KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH	
		S3		S2		S1		NON S1			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
	8	Penata Laporan Keuangan						1			1
	9	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor							1		1
	10	Pengadministrasi Perencanaan dan Program							1		1
	11	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana							1		1
	12	Pengadministrasi Umum								1	1
	13	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah							1		1
	14	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan					1				1
	15	Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI)								1	1
16	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana								1	1	
FUNGSIONAL	1	Perencana Muda			1	1		1			3
	2	Perencana Pertama				1	2	4			6
	3	Pranata Komputer Muda			1						1
	4	Pranata Komputer Pertama					3				3
	5	Statistisi Pelaksana Lanjutan			1						1
	6	Statistisi Pertama									
	7	Penerjemah Pertama					1				1
	8	Peneliti Pertama					1	3			4
	9	Pranata Humas					1				1
	10	Arsiparis Terampil Pelaksana							1		1
	11	Calon Perencana					1				1
	12	Calon Analis Kebijakan					2				2
	13	Calon Pranata Komputer								4	1
		JUMLAH	4	0	10	10	21	16	6	4	71

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Gambar 1
Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Memperhatikan kondisi pegawai seperti tersebut di atas, berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki secara umum kekuatan aparatur Bappeda cukup memadai.

I.6 Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, sampai saat ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi, misalnya saja setiap pegawai memiliki komputer sebagai alat bantu kerja yang utama kemudian alat bantu dukung lainnya seperti *drone*, *infocus*. Kebutuhan akan listrik, telepon, faximili dan internet telah terpenuhi. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah juga telah memiliki server yang memuat database website Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk juga beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aplikasi tersebut antara lain, *e-planning*, Sipena, SI KarEn, Ina Geo Portal, dsb. Tabel 2 berikut menampilkan asset Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2
Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

(No)	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
	A		ASET TETAP		Rp. 21.207.376.202,00
1	01	01	TANAH	1	Rp 35.247.769
2	02		PERALATAN DAN MESIN	1434	Rp. 7.657.845.513
		02	Alat-alat Besar	0	0
		03	Alat-alat Angkutan	15	Rp. 1.706.370.000,00
		04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	2	Rp. 16.600.000
		05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	
		06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1692	Rp. 5.280.368.513,00
		07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	83	Rp. 635.107.000,00
		08	Alat-alat Kedokteran	0	
		09	Alat-alat Laboratorium	0	
		10	Alat-alat Keamanan	16	Rp. 19.400.000,00
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	11	Rp. 5.946.011.600
		11	Bangunan Gedung	11	Rp. 5.946.011.600
		12	Bangunan Monumen	4	Rp. 98.940.000,00
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	11	Rp. 4.126.589.900
		13	Jalan dan Jembatan	2	Rp. 33.330.000
		14	Bangunan Air / Irigasi	0	0
		15	Instalasi	0	0
		16	Jaringan	8	Rp. 4.123.259.900
5	05		ASET TETAP LAINNYA	25	Rp. 3.312.741.420
		17	Buku Perpustakaan	21	Rp. 3.299.881.420
		18	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	4	Rp. 12.860.000
		19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	0
			Lain-lain	0	0
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	
7	B		ASET LAINNYA		0
	01		Aset Tak Berwujud	0	-
	02		Aset Lain-lain	0	0

Sumber : Buku Inventaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

I.7 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2018, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat alokasi dana sebesar Rp 20.489.887.059,00 yang bersumber dari APBD meliputi Belanja Tidak Langsung Rp9.575.263.550,00 dan Belanja Langsung Rp10.914.623.509,00 yang diperuntukan bagi pelaksanaan 6 (enam) Program sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.

Tabel 3
Pagu Anggaran Tahun 2018
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
1.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Rp 5.929.796.259,00	Rp 5.929.796.259,00
2.	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	-	Rp 2.613.011.500,00	Rp 2.613.011.500,00
3.	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan		Rp. 413.056.000,00	Rp. 413.056.000,00
4.	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	Rp 307.449.000,00	Rp 307.449.000,00
5.	Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	-	Rp 457.307.750,00	Rp 457.307.750,00
6.	Program Penelitian dan Pengembangan	-	Rp 1.194.003.000,00	Rp 1.194.003.000,00
JUMLAH		Rp9.575.263.550,00	Rp10.914.623.509,00	Rp20.489.887.059,00
				100 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Dana atau anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain sebagian besar berasal dari APBD Daerah juga didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBN. Rincian anggaran yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran Belanja Langsung Bappeda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

SUMBER DANA	BESAR ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
APBD	Rp 20.489.887.059,00	95,73
APBN	Rp 913.291.000,00	4,27
TOTAL	Rp 21.403.178.059,00	100 %

Sumber : CALK Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

A. Isu Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah sehingga menimbulkan kesenjangan informasi perencanaan di pusat dan daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang telah dikembangkan;
4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang aktual, valid, dan mudah diakses sebagai bahan perencanaan pembangunan/perumusan kebijakan.
5. Belum termanfaatkan sepenuhnya hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi Dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Adapun visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

Arti dan makna yang dimaksud adalah:

- **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
- **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat pendapatan masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
- **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan tatapemerintahan yang baik (*good governance*).
- **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.

- **Efisien dan Cepat** dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan hemat, dengan peningkatan penggunaan *e-Government* (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- **Teknologi** dimaknai dengan penerapantata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

Untuk mewujudkan visi diatas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut :

Tabel 5
Misi Tahun 2017 - 2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	MISI
1.	Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
2.	Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas.
3.	Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.
4.	Meningkatkan kesehatan masyarakat.
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.
6.	Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Misi Pertama meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Pembangunan ekonomi* adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. *Berbasis potensi daerah* adalah pembangunan daerah dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

Misi kedua mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Infrastruktur* adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. *Konektivitas daerah* adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

Misi ketiga meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Sumber daya manusia* adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Unggul dan handal* adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

Misi keempat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Kesehatan Masyarakat* adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

Misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Tata Kelola Pemerintahan yang baik* adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. *Pembangunan demokrasi* adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Misi keenam meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna: *Pengendalian bencana* adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari

sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana. *Kualitas lingkungan hidup* adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan penelaahan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh Bappeda, maka Bappeda secara khusus mendukung misi ke-5 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”**.

II.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda.

Berdasarkan penjelasan atas keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka tujuan pembangunan jangka menengah Bappeda yang ingin diwujudkan pada tahun 2022 adalah: **“Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik”** dan **“Evaluasi Kinerja Baik”**. Tujuan ini dirumuskan, erat kaitannya dengan dukungan Bappeda dalam mencapai indikator sasaran pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Provinsi meningkat di dalam RPJMD.

Tabel 6
Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk Mencapai Misi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”.	Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik	Nilai Perencanaan Kinerja dalam Lakip Provinsi	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)
	Evaluasi kinerja Baik	Predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi
			Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel 7 Berikut:

Tabel 7**Target capaian Sasaran Kinerja Bappeda 2017-2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			I	II	III	IV	V
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	80%	80%	90%	90%	95%
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	80%	90%	90%	95%	95%
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	75%	80%	85%	90%	90%

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

II.1.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2017 – 2022 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan daerah sebagaimana dalam RPJMD 2017 – 2022 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga perencana daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 8
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

Misi Ke 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik	1. Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	1.1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas PD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh	1.1.1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku
			1.1.2. Optimalisasi dan pengembangan e-planning dalam proses penyusunan dokumen perencanaan

Misi Ke 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		stakeholders pembangunan	1.1.3. Penyusunan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah
		1.2. Menyusun rumusan kebijakan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan	1.2.1. Melaksanakan penelitian yang sesuai dengan prioritas daerah
			1.2.2. Mengembangkan sistem inovasi daerah
			1.2.3. Melakukan kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan
		1.3. Mengembangkan sistem informasi data untuk publik	1.3.1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dan publik dalam mengakses data dan informasi pembangunan yang valid
	2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	2.1. Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan kualitas pelaporan kinerja PD	2.1.1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan supervisi perencanaan dengan PD, lintas bidang, lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Kab/Kota) dan kualitas pemantauan, pengendalian, evaluasi dan supervisi pelaksanaan rencana PD 2.1.2. Penyusunan kajian/studi yang mendukung perencanaan lintas sektor
Evaluasi kinerja Baik	3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi	3.1. Menempatkan hasil pengendalian sebagai rumusan	3.1.1. Meningkatkan ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan laporan-laporan sesuai aturan

Misi Ke 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	perencanaan pembangunan Daerah	perencanaan selanjutnya	dengan tepat waktu. 3.1.2. Optimalisasi dan pengembangan e-dalev dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
	4. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	4.1. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pelaporan kinerja PD	4.1.1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan supervisi perencanaan dengan PD, lintas bidang, lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Kab/Kota) dan kualitas pemantauan, pengendalian, evaluasi dan supervisi pelaksanaan rencana PD
	5. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah oleh Bappeda	5.1 Pemenuhan secara bertahap kebutuhan Bappeda terhadap akses dan fasilitas pendukung kerja 5.2 Predikat SAKIP Bappeda	5.1.1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Bappeda 5.1.2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang 5.1.3. Meningkatkan disiplin aparatur Bappeda 5.1.4. Meningkatkan kapasitas SDM Bappeda 5.1.5. Meningkatkan koordinasi perencanaan dengan Nasional dan Daerah lainnya 5.2.1 Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan di Bappeda 5.2.2 Meningkatkan ketaatan



Misi Ke 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			dan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan Bappeda

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari Non Urusan, Urusan Perencanaan, dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Pejelasan program tersebut adalah :

A) Non Urusan

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- f. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- g. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional

B) URUSAN PERENCANAAN

1. Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, target indikator sasaran, program dan target indikator program dalam RKPD dengan RPJMD; Persentase keselarasan Program, kegiatan dan pagu anggaran antara RKPD dengan APBD; Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti; Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang tervalidasi dan dapat Diakses dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- c. Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah
 - d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah
 - e. Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 - f. Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase PD mitra Bidang Infratraktur dan Kewilayahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B); Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Infratraktur dan Kewilayahan yang tercapai dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I
 - b. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II
3. Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B) dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I
 - b. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II
 - c. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
4. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tercapai; Persentase PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik (memperoleh predikat/nilai SAKIP minimal B) dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I

- b. Koordinasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II
- c. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

C) URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Program Penelitian dan Pengembangan Program ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah
 - b. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
 - c. Penguatan Jaringan Kelitbangan
 - d. Kajian Science Technology Park
 - e. Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah

II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2018 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merencanakan target kinerja tahun 2018. Semua sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam RKT sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Tabel 9
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	100 %	Program Perencanaan, Evaluasi dan Infomasi Pembangunan Daerah <u>Kegiatan :</u> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Rp. 1.835.145.000,00
Meningkatnya kualitas dokumen	Persentase Renstra PD yang baik	80 %	Program Perencanaan Infrastruktur dan	Rp. 2.403.812.750,00



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
perencanaan perangkat daerah	(memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)		<p>Kewilayahan</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I 2. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II <p>Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I 2. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II 3. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam <p>Pogram Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perenanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I 2. Perenanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II 3. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan <p>Program Penelitian dan Pengembangan</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah 2. Penguatan Jaringan Kelitbangan 3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 4. Kajian Science Technology Park 5. Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan 	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program Perencanaan, Evaluasi dan Infomasi Pembangunan Daerah <u>Kegiatan :</u> 1. Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	80 %	Program Perencanaan, Evaluasi dan Infomasi Pembangunan Daerah <u>Kegiatan :</u> 1. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah 2. Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Rp. 453.671.500,00
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	75 %	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan <u>Kegiatan :</u> 1. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I 2. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam <u>Kegiatan :</u> 1. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I 2. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II Pogram Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan <u>Kegiatan :</u> 1. Perenanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan	Rp. 292.198.000,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemerintahan I 2. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

II.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA). Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja BAPPEDA tahun 2018:

Tabel 10
Penetapan Kinerja BAPPEDA Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	100 %
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	80 %
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	80 %

No	Sasaran	Indikator	Target
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	75 %

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

II.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 11			
Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Strategis BAPPEDA			
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018			
No	Sasaran	Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Rp. 1.835.145.000,00	16,81
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 2.403.812.750,00	22,02
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Rp. 453.671.500,00	4,16
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 292.198.000,00	2,68
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah oleh Bappeda	Rp. 5.929.796.259,00	54,33

Sumber : CALK Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 12
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

∞ Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, (diolah)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 13 berikut:

Tabel 13
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	%	100	100	100	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	%	80	100	125	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	%	80	81,81	102,26	Sangat Baik
4.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	%	75	85	113,33	Sangat Baik

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan uraian pada Tabel 13 diatas, maka rangkuman hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sasaran, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 14				
Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja				
No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	1	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	1	125	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1	102,26	Sangat Baik
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	1	113,33	Sangat Baik

Dari tabel 14 di atas terdapat empat sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 (empat) indikator sasaran strategis. Pada tahun 2018, terdapat 4 (empat) indikator tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan atau telah mencapai sekurangnya 80% untuk masing-masing indikator dari total indikator. Capaian tertinggi adalah indikator kinerja ke-2 dengan persentase capaian sebesar 125% , disusul dengan indikator kinerja ke-4, 3 dan 1 dengan persentase capaian masing-masing sebesar 113,33%, 102,26 dan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : “Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan”.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan program pembangunan, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD.

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kesesuaian pelaksanaan program pembangunan dengan indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 15
Capaian kinerja sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017 %	2018			Target Akhir Renstra (2022) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)

Indikator 1 : Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD}}{\text{total jumlah program pada tahun rencana yang sesuai dalam RPJMD yang dilaksanakan/ditindaklanjuti}} \times 100 \%$$

$$\frac{203}{203} \times 100 \%$$
$$= 100 \%$$

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-1 pada tahun 2018 sesuai dengan target sebesar 100%. Indikator ini digunakan pada tahun 2018 untuk

mengukur tingkat capaian sasaran pembangunan tahunan yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Kesesuaian antara muatan RKPD dengan target/sasaran dalam RPJMD diukur berdasarkan Jumlah program dalam RKPD dibandingkan dengan total jumlah program pada tahun rencana yang sesuai dalam RPJMD yang dilaksanakan/ditindaklanjuti. Adapun persandingan Jumlah program dalam RKPD dengan Total Program dalam RPJMD berdasarkan prioritas daerah tahun 2018.

Berikut ini adalah hasil pengukuran capaian sasaran kinerja pada tahun 2018;

Tabel 16
Sandingan Program RKPD Tahun 2018 dengan Program RPJMD

NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
2	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
3	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
4	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
5	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
6	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
7	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
8	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
9	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
10	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
11	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
12	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
13	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
14	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
15	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
16	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
17	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
18	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
19	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
20	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
21	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
23	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
24	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
25	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
26	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
27	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
28	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
29	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
30	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
32	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
33	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
34	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
35	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
36	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	√	√
37	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	√	√
38	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	√	√
39	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	√	√
40	Program Peningkatan Layanan Teknis Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Khusus	√	√
41	Program Peningkatan Pelayanan Tata Kelola Kependidikan	√	√
42	Program Kesehatan Masyarakat	√	√
43	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	√	√
44	Program Pelayanan Kesehatan	√	√
45	Program Sumber Daya Kesehatan	√	√
46	Program Pelayanan Teknis Keperawatan	√	√
47	Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis	√	√
48	Program Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	√	√
49	Program Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan	√	√
50	Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa	√	√
51	Program Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	√	√
52	Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	√	√
53	Program Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	√	√
54	Program Pengembangan Sumber Daya Air	√	√
55	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	√	√
56	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	√	√
57	Program Pengembangan Tata Bangunan, Kawasan Permukiman, Air minum dan Penyehatan Lingkungan	√	√
58	Program Pengembangan Perumahan Rakyat	√	√
59	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	√	√
60	Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	√	√
61	Program Penegakan Perda dan Perkada	√	√
62	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	√	√
63	Program Rehabilitasi Sosial	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
64	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	√	√
65	Program Penanganan Farkir Miskin	√	√
66	Program Pemberdayaan Sosial	√	√
67	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	√	√
68	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Eks Psikotik	√	√
69	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	√	√
70	Program Peningkatan Logistik/Peralatan, Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	√	√
71	Program Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	√	√
72	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	√	√
73	Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	√	√
74	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja	√	√
75	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	√	√
76	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	√	√
77	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	√	√
78	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	√	√
79	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	√	√
80	Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	√	√
81	Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas dan Cadangan Pangan	√	√
82	Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	√	√
83	Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah	√	√
84	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	√	√
85	Program Peningkatan Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup	√	√
86	Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	√	√
87	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	√	√
88	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	√	√
89	Program Kependudukan dan Catatan Sipil	√	√
90	Program Pembinaan Pemerintah Desa	√	√
91	Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	√	√
92	Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat	√	√
93	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	√	√
94	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	√	√
95	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut	√	√
96	Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan	√	√
97	Program Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe B	√	√
98	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	√	√
99	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	√	√
100	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan	√	√
101	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	√	√
102	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
103	Program Peningkatan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu KUKM	√	√
104	Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	√	√
105	Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	√	√
106	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	√	√
107	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	√	√
108	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	√	√
109	Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	√	√
110	Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	√	√
111	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	√	√
112	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	√	√
113	Program Pengembangan Kebudayaan	√	√
114	Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	√	√
115	Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	√	√
116	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	√	√
117	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	√	√
118	Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	√	√
119	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	√	√
120	Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	√	√
121	Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	√	√
122	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	√	√
123	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau	√	√
124	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Budidaya Ikan Laut	√	√
125	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar	√	√
126	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	√	√
127	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	√	√
128	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata	√	√
129	Program Peningkatan Teknis Museum	√	√
130	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Parekraft	√	√
131	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura	√	√
132	Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	√	√
133	Program Pengembangan Perkebunan	√	√
134	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	√	√
135	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	√	√
136	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	√	√
137	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	√	√
138	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Veteriner	√	√
139	Program Pengembangan Penyuluhan dan Peningkatan SDM Pertanian	√	√
140	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	√	√
141	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
142	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	√	√
143	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	√	√
144	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	√	√
145	Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	√	√
146	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	√	√
147	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	√	√
148	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	√	√
149	Program Pengembangan Perdagangan	√	√
150	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	√	√
151	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	√	√
152	Program Pengembangan Perdagangan	√	√
153	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	√	√
154	Program Pengembangan dan Pemasaran Industri	√	√
155	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	√	√
156	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	√	√
157	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	√	√
158	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	√	√
159	Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	√	√
160	Program Perencanaan Setda	√	√
161	Program Peningkatan Tata Kelola Perpajakan	√	√
162	Program Peningkatan Pendapatan dan Retribusi	√	√
163	Program Penganggaran Pembangunan Daerah	√	√
164	Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi dan Perbendaharaan	√	√
165	Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan	√	√
166	Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	√	√
167	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Penerimaan Pendapatan Daerah	√	√
168	Program Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerimaan, Promosi, Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun Aparatur Sipil Negara	√	√
169	Program Peningkatan Penilaian Kinerja, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	√	√
170	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	√	√
171	Program Pemetaan Potensi Aparatur	√	√
172	Program Penelitian dan Pengembangan	√	√
173	Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	√	√
174	Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	√	√
175	Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	√	√
176	Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	√	√
177	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Protokol Dewan	√	√
178	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	√	√
179	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	√	√
180	Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
181	Program Pengendalian Pembangunan	√	√
182	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	√	√
183	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	√	√
184	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	√	√
185	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	√	√
186	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Kb, Dan Pemuda	√	√
187	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√	√
188	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	√	√
189	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	√	√
190	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	√	√
191	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	√	√
192	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi	√	√
193	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	√	√
194	Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	√	√
195	Program Peningkatan Informasi dan Investasi Serta Pelayanan Penghubung Provinsi	√	√
196	Program Penelitian dan Pengembangan	√	√
197	Program Pengembangan Otonomi Daerah	√	√
198	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	√	√
199	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	√	√
200	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	√	√
201	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	√	√
202	Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	√	√
203	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	√	√

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah program yang mendukung prioritas daerah dalam RPJMD telah selaras dengan program yang ada pada RKPD. Seluruh rencana kegiatan yang ada dalam RKPD diharapkan dapat mendukung terwujudnya pencapaian target/sasaran pembangunan daerah sebagaimana dimandatkan dalam RPJMD. Dalam melakukan reviu atas kesesuaian rancangan RKPD dengan target/sasaran dalam RPJMD juga dilakukan verifikasi secara bersamaan atas target/sasaran RPJMD yang harus dijabarkan dalam sasaran RKPD tiap tahunnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa antara RPJMD dengan RKPD telah memiliki integrasi dan sinergis secara konsisten. Dengan demikian, muatan RKPD harus mendukung pencapaian target/sasaran RPJMD.

Disamping itu pada tahun 2018 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai hasil yang sangat memuaskan di bidang dokumen

perencanaan pembangunan. Anugerah tersebut merupakan penghargaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD 2018. Penghargaan ini untuk keempat kalinya diterima oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai nominasi terbaik tingkat nasional. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas dokumen perencanaan tahunan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran I adalah :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan penyusun dokumen perencanaan untuk mempedomani dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam menyusun dokumen RKPD.
- Keselarasan dan kesesuaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD maupun RKPD.

Potensi Hambatan

- Kemungkinan adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD. Hal ini mengingat periodisasi yang berbeda, dimana RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima tahunan. Sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan, sehingga bisa saja muncul kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Strategi Pemecahan

- Merumuskan kebijakan pada RPJMD secara lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.
- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja sasaran I:

Untuk Sasaran I yaitu Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan dengan target indikator sebesar 80% dialokasikan anggaran

sebesar Rp1.835.145.000,00, dalam pencapaiannya dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 31,49 %.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran I yaitu Program Perencanaan, Evaluasi dan Infomasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah

Sasaran II : “Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah”.

Tolok ukur capaian sasaran ke-2 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 125% dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 17

Capaian kinerja sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017 %	2018			Target Akhir Renstra (2022) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	80	80	100	125	95

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Renstra Perangkat Daerah yang baik}}{\text{Total jumlah Renstra Perangkat Daerah}} \times 100 \%$$
$$\frac{34}{34} \times 100 \%$$
$$= 100$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-2 pada tahun 2018 telah melebihi target sebesar 20%, dari target yang ditetapkan sebesar 80% mampu direalisasikan sebesar 100%.

Berikut ini adalah hasil pengukuran capaian sasaran kinerja pada tahun 2018;

Tabel 18

Daftar Peringkat/kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2017
Di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	INSTANSI	NILAI	KATEGORI	INTERPRETASI
1	Badan Perencana Pembangunan Daerah Prov. Kep. Babel	81,80	A	Memuaskan
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kep. Babel	80,79	A	Memuaskan
3	Rumah Sakit Jiwa	80,68	A	Memuaskan
4	Inspektorat	79,37	BB	Sangat Baik
5	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	78,81	BB	Sangat Baik
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa	78,42	BB	Sangat Baik
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77,16	BB	Sangat Baik
8	Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Kep. Babel	76,85	BB	Sangat Baik
9	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	76,80	BB	Sangat Baik



No.	INSTANSI	NILAI	KATEGORI	INTERPRETASI
10	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	76,53	BB	Sangat Baik
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	76,53	BB	Sangat Baik
12	Badan Keuangan Daerah	76,60	BB	Sangat Baik
13	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	76,39	BB	Sangat Baik
14	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu	76,27	BB	Sangat Baik
15	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	76,01	BB	Sangat Baik
16	Dinas Pendidikan	76,00	BB	
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75,87	BB	Sangat Baik
18	Rumah Sakit Umum Provinsi	75,55	BB	Sangat Baik
19	Dinas Kesehatan	75,52	BB	Sangat Baik
20	Dinas Pertambangan & Energi	75,51	BB	Sangat Baik
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	75,37	BB	Sangat Baik
22	Dinas Sosial	75,33	BB	Sangat Baik
23	Dinas Pangan	75,29	BB	Sangat Baik
24	Dinas Komunikasi & Informatika	75,24	BB	Sangat Baik
25	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	75,17	BB	Sangat Baik
26	Dinas Perindustrian & Perdagangan	75,10	BB	Sangat Baik
27	Dinas Kehutanan	75,03	BB	Sangat Baik
28	Sekretaris Daerah	75,01	BB	Sangat Baik
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	74,83	BB	Sangat Baik
30	Dinas Perhubungan	74,45	BB	Sangat Baik
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan	74,21	BB	Sangat Baik
32	Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat	74,13	BB	Sangat Baik
33	Sekretariat DPRD	72,94	BB	Sangat Baik
34	Badan Penghubung	71,18	BB	Sangat Baik

Sumber: Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan:

1. AA = Nilai Angka >90-100 (sangat memuaskan)
2. A = Nilai Angka > 80-90 (Memuaskan)

3. BB = Nilai Angka > 70-80 (Sangat baik)
4. B = Nilai Angka > 60-70 (Baik)
5. CC = Nilai angka > 50-60 (Cukup memadai)
6. C = Nilai Angka > 30-50 (kurang)
7. D = Nilai Angka 0-30 (sangat kurang)

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 2 adalah :

- Adanya komitmen dari pimpinan dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah agar lebih baik

Potensi Hambatan

- Masih adanya kurang pemahaman dan ketidakpedulian ASN atas substantif dokumen perencanaan yang berkualitas.

Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kompetensi pimpinan dan seluruh perencana dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja sasaran II:

Untuk Sasaran II yaitu Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target indikator sebesar 80% dialokasikan anggaran sebesar Rp2.403.812.750,00 dalam pencapaiannya dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 26,08%.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran II yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan :

- a. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I
- b. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II

2. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kegiatan :

- a. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I
- b. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II

- c. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3. Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
Kegiatan :
 - a. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I
 - b. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II
 - c. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
4. Program Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan :
 - a. Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah
 - b. Penguatan Jaringan Kelitbangan
 - c. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
 - d. Kajian Science Technology Park
 - e. Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan
5. Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
Kegiatan :
 - a. Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran III : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Tolok ukur capaian sasaran ke-3 Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 142,86% dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 19
Capaian kinerja sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017 %	2018			Target Akhir Renstra (2022) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	65	80	81,81	102,26	95

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah capaian sasaran pembangunan daerah pada RKPD yang mencapai target}}{\text{Total sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD}} \times 100 \%$$

$$\frac{18}{22} \times 100 \% = 81,81$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-3 pada tahun 2018 mampu direalisasikan sebesar 102,26% dari target capaian sebesar 80% namun terealisasi sebesar 81,81%.

Ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD diukur berdasarkan jumlah capaian sasaran pembangunan daerah pada RKPD yang mencapai target dibandingkan dengan Total sasaran pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan indikator sasaran masing-masing. Adapun rincian pencapaian sasaran menggunakan skala pengukuran capaian kinerja sebagai berikut;

Tabel 20
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	>100%	Sangat Berhasil
2.	75% s.d 100%	Berhasil
3.	55% s.d 75%	Cukup Berhasil
4.	< 50	Kurang Berhasil

Berikut ini adalah hasil pengukuran capaian sasaran kinerja pada tahun 2018;

Tabel 21
Capaian Sasaran Pembangunan Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	KONDISI AKHIR RPJMD
			2018	2018	
1	2	3	5	6	10
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,80	5,49	5,15
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	2 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,80	3,85	4.00
3	Meningkatnya pengembangan dan Pembangunan pariwisata	3 jumlah kunjungan wisatawan domestik	389.009	389.009	477.181
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	5 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,53	-1,08	0.73
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	6 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2,63	4,04	2.86
6	Terwujudnya kemandirian energi	7 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan	12,80	7,44	12,95
7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	8 Persentase pertumbuhan pengeluaran Pemerintah daerah	5.6	1,76	5.80
8	Menurunnya angka Pengangguran	9 Persentase Angka Pengangguran	5,70	3,60	5.3
9	Menurunnya angka kemiskinan	10 Persentase Angka Kemiskinan	5,22	4,77	5.0
10	Menurunnya angka Inflasi	11 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.42	3,45	6.02
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	12 Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2.09	2,09	2,08
12	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	13 Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.084	1.084	1.294
		14 Ketersediaan air baku (m3)	N.A	N,A	175.000
13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	15 Persentase akses jalan lingkungan yang memadai	14%	14%	100%
		16 Persentase kawasan permukiman yang tertata	16%	16%	100%
		17 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	83	83	92

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	KONDISI AKHIR RPJMD
			2018	2018	
1	2	3	5	6	10
14	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	18 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0.17%	0.17%	2.495
		19 Persentase armada pengangkutan	0.33%	0.33%	4.875
		20 Persentase jalan kondisi mantap	93.50	93.50	96.50
15	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	21 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11.84	11.83	12.00
			L=12,08	L=12,37	L=12,81
			P=12,21	P=12,46	P=12,93
16	Meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat	22 Angka Kesehatan Masyarakat	71,6	71,6	89,98
17	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	23 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		24 Tingkat kematanganMaturitas SPIP	3	3	4
		25 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	65	67,17	75
		26 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	2,75	2,94	2,9
18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	27 Nilai rata-rata delapan area perubahan	30	35	50
		28 Indeks Profesionalitas ASN	63	67,5	90
19	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	29 Unit KerjaBerpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1	1	7
		30 Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	B	B	B
20	MeningkatnyaKebebasansipil, hakpolitikdanlembagademokrasimasyarakat	31 Skor aspek kebebasan sipil	87,75	87,76	87.82
		32 Skor aspek hak-hak politik	81.72	81.76	81,85
		33 Skor aspek lembaga demokrasi	80,30	80,33	80,54
21	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	34 Indeks kapasitas bencana daerah	0,15	0,20	0,35
22	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	35 Indeks kualitas air sungai	65,85	67,80	69,88
		36 Indeks kualitas udara	85,30	87,86	96,01
		37 Indeks tutupan lahan	37,88	37,88	39,81
		38 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	7.745,58	7.745,58	6.047,35

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 3 adalah :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan masing-masing koordinator terhadap pencapaian indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan

Potensi Hambatan

- Program/kegiatan yang sudah didesain tidak mempunyai sumbangan yang nyata terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah disiapkan.
- Masih adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD.

Strategi Pemecahan

- Melakukan monitoring dalam pelaksanaan program/kegiatan terhadap target indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja sasaran III:

Untuk Sasaran III yaitu Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan target indikator sebesar 80% dialokasikan anggaran sebesar Rp 453.671.500,00 dalam pencapaiannya dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 37,25%.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran III yaitu Program Perencanaan, Evaluasi dan Infomasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan :

1. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah
2. Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Sasaran IV : Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah

Tolok ukur capaian sasaran ke-4 Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi.

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 113,33% dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 22
Capaian kinerja sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017 %	2018			Target Akhir Renstra (2022) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	75	75	85	113,33	95

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

Jumlah capaian program pada Renstra yang mencapai target	
Jumlah total program pada RPJMD	X 100 %

$$\frac{172}{203} \times 100 \% = 85$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-4 pada tahun 2018 telah melebihi target sebesar 15%, dari target yang ditetapkan sebesar 75% mampu direalisasikan sebesar 85%.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran IV adalah :

- Komitmen yang tinggi dari masing-masing koordinator kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan
- Keselarasan dan kesesuaian tujuan dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD

Potensi Hambatan

- Program/kegiatan yang sudah didesain tidak mempunyai sumbangan yang nyata terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah ditetapkan.

Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
- Merumuskan kebijakan pada RPJMD secara lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja sasaran IV:

Untuk Sasaran IV yaitu Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah dengan target indikator sebesar 75% dialokasikan anggaran sebesar Rp 292.198.000,00 dalam pencapaiannya dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 0,79%.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran IV yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan :

- a. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I
- b. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II

2. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kegiatan :

- a. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I
- b. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II

3. Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Kegiatan :

- a. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I
- b. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 75,59% dari total anggaran yang dialokasikan, Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 40,92% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 59,08%, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-4 yaitu Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah (99,21%), Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (62,75).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 23 berikut:

TABEL 23
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER SASARAN TAHUN 2017

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	80	100	100	Rp1.835.145.000,00	Rp.1.257.262.181,00	68,51
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	80	100	125	Rp2.403.812.750,00	Rp. 1.776.984.827,0	73,92
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	80	81,81	102,26	Rp453.671.500,00	Rp. 284.669.609,00	62,75
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	75	85	113,33	Rp292.198.000,00	Rp. 289.898.000,00	99,21



Jumlah	Rp 4.984.827.250,00	Rp3.608.814.662,00	
Belanja Langsung Pendukung	Rp5.929.796.259,00	Rp 5.210.176.219,00	
Total Belanja Langsung	Rp10.914.623.509,00	Rp 8.818.990.881,00	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Capaian realisasi keuangan program/kegiatan yang menunjang sasaran Bappeda bervariasi antara rendah hingga baik. Selain faktor kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan waktu memulai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan; faktor pengambilan keputusan memanfaatkan momen perubahan anggaran pada pertengahan tahun anggaran sangat menentukan keberhasilan untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan di masa mendatang.

C. Tindak Lanjut atas Evaluasi Laporan Kinerja T.A 2018

Hasil evaluasi dari Inspektorat, Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 81,80 dengan interpretasi predikat A, perlu sedikit perbaikan.

1. Rekomendasi Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2018
 1. Perlunya monitoring rencana aksi kinerja;
 2. Rencana aksi untuk dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian kegiatan;
 3. Mengupayakan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi Sistem AKIP terintegrasi;
 4. Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
 5. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja hendaknya dapat menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU;
 6. Meningkatkan penyajian laporan kinerja atas efisiensi anggaran;
 7. Informasi kinerja hendaknya dapat digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja;



8. Untuk melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap rencana aksi secara optimal;
9. Hasil atas evaluasi rencana aksi hendaknya dapat menunjukkan perbaikan setiap periode;
10. Hasil evaluasi program dan rencana aksi hendaknya dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan;
11. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.

2. Tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Mengupayakan pelaksanaan monitoring rencana aksi kinerja;
- b. Mengupayakan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi Sistem AKIP terintegrasi;
- c. Mengupayakan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan terhadap rencana aksi secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (Empat) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 4 (empat) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana
2. Hasil analisis 4 (empat) indikator sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD, Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan

jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat), Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi, Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi telah melampaui target yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dan pejabat fungsional peneliti dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait dengan penyusunan dokumen kinerja.

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang
Tel: (0717) 439335, Fax: (0717) 439336